

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI STAF
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkalis)
Oleh : Dariana,SE.MM
Dan
Jonase Oktavia, S.Akun**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 93 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan Kepala Subbagian, Bendahara, dan Staf Akuntansi bagian keuangan pada 31 Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 42,1% sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Katakunci : Akuntansi, Pengendalian, Kompetensi, Laporan Keuangan

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pemerintah dituntut untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Adapun pengertian Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah diberlakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit, di pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel.¹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Lebih Anggaran.²

Mengenai kualitas laporan keuangan selain menggunakan standar akuntansi pemerintahan tidak terlepas juga diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010.

Sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008. Pengertian Sistem pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit. Review atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Laporan Keuangan yang disajikan harus berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Selain LHP atas LKPD TA 2011, BPK juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.

Hal-hal yang mempengaruhi pemberian opini Laporan Keuangan tersebut salah satunya adalah Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern,

¹ Nordiawan, Ayuningtyas, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 31

² www.span.depkeu.go.id, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018, Pukul 21:29 Wib.

antara lain: Saldo persediaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, Penyajian Investasi Non Permanen pada Neraca tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian internal atas pengelolaan dan penatausahaan dana investasi non permanen lemah, Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah sisa uang persediaan TA 2010 dan TA 2011 belum disetor ke kas daerah.³

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Bengkalis yaitu mengenai opini audit yang diberikan BPK RI pada tahun 2011 yaitu tidak memberikan opini. Hal-hal yang menjadi temuan BPK pada laporan keuangan tahun 2011 menunjukkan aset tetap yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai.

Penelitian ini replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh T. Asri Yunita dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SOPD Kota Dumai)”. Perbedaan yang akan saya teliti terdapat pada objek penelitiannya yaitu Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlaila yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)”. Dari judul tersebut terlihat adanya perbedaan dengan judul yang akan saya teliti. Pada penelitian yang akan saya teliti menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf objek penelitiannya juga berbeda yaitu di Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil uraian diatas terkait dengan fenomena yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melihat adanya hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
- b) Pada tahun anggaran 2011 BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- c) Dalam Laporan Keuangan Daerah adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

³ www.bpk.go.id, Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Pukul 20:15

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?
- b. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?
- c. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?
- d. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menguji dan menjelaskan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui, menguji dan menjelaskan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui, menguji dan menjelaskan pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama
 H_1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2. Hipotesis kedua
 H_2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3. Hipotesis ketiga
 H_3 : Kompetensi Staf berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4. Hipotesis keempat
 H_4 : Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

E. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu variabel bebas (*Defendant Variabel*) dan variabel terikat (*Independent Variabel*). Variabel bebasnya terdiri atas Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 1
Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menjadikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis akuntansi 2. Nilai historis 3. Substansi mengungguli bentuk 4. Perioditas 5. Konsistensi 6. Pengungkapan 7. Lengkap 8. Penyajian wajar. 	<i>Likert</i>
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat Daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan 	<i>Likert</i>
Kompetensi Staf Akuntansi (X ₃)	Kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seorang serta mempunyai prilaku yang dapat diprediksi pada saat melakukan pekerjaan. (Spencer dan Spencer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Konsep diri dan nilai-nilai 4. Karakteristik pribadi 5. Motif 	<i>Likert</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami. 	<i>Likert</i>

informasi akuntansi
sehingga dapat
memenuhi tujuannya.
(Indra Bastian)

B. Landasan Teoritis

1. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.⁴

Menurut Farid dan Siswanto yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.⁵

Menurut Munawir laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.⁶

Sedangkan Laporan Keuangan menurut Baridwan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.⁷

Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.⁸

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Keuangan gabungan dari seluruh SOPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD.

⁴ Febrian Cahyo, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SOPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.22 No.2 :188-200, 2015, h.189

⁵ Farid dan siswanto, "*Analisis Laporan Keuangan*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.2

⁶ Munawir, "*Analisa Laporan Keuangan (Edisi Keempat)*", (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.2

⁷ Baridwan, Zaki, "*Pengantar Akuntansi Edisi 21*", (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h.17

⁸ Indra Bastian, "*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Erlangga, 2010), h.297

Laporan keuangan pemerintah daerah ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.⁹

Karakteristik kualitatif merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:¹⁰

a. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pengguna. Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta memiliki kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan. Namun demikian, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan sektor publik tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum.

b. Relevan

Informasi yang disajikan haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi laporan keuangan berkualitas yang dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini dan juga untuk memprediksikan masa depan.

c. Keandalan

Agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat, informasi yang disajikan juga harus bersifat andal. Informasi yang berkualitas baik memiliki keandalan. Andal disini dimaksudkan laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya.

d. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode atau mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Kualitas laporan keuangan menunjukkan bagaimana kondisi suatu pemerintahan. Apabila kualitasnya baik maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan sebaliknya, jika kualitas laporan keuangan suatu pemerintah itu buruk maka dapat diindikasikan masih ada permasalahan dan buruknya sistem pemerintahan disuatu daerah, sehingga masih banyak hal yang perlu diperbaiki baik dalam standar akuntansi yang belum sesuai, pengendalian

⁹ Nunuy Nur Afiah, "Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah" Lihat Pada Ema Nirwana dan Jhon Suhaidi, "Analisis Basic Cash Towards Accrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012-2014", *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1-206, 2017, h.178

¹⁰ Ihayul Ulum, "Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar", (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), h.185

internal yang kurang memadai hingga tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Wijaya, standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.¹¹

Standar akuntansi pemerintah merupakan dasar yang digunakan dalam akuntansi pemerintah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Didalam SAP, mengandung prinsip-prinsip cara penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Maka dari itu, SAP merupakan salah satu syarat yang penting untuk mendukung meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang diharapkan agar dapat menciptakan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan negara agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Standar Akuntansi Pemerintahan diberlakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam laporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan Standar Akuntansi Pemerintah yang kredibel.¹² Perkembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2005 bahwa untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun para pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat

¹¹ Adi, Wijaya, “Kebijakan Pembangunan Daerahh Dalam Era Otonomi” (Jakarta: P2E-LIPI, 2003), h. 4

¹² Nordiawan, Ayuningtyas, “Akuntansi Sektor Publik”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.31

dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual paling lambat pada tahun 2014. Selain mengatur SAP berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP berbasis kas menuju akrual yang saat ini masih digunakan seluruh entitas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat basis akrual antara lain:¹³

- a. Memberi gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait dengan jasa layanan efisiensi dan pencapaian tujuan.

Standar akuntansi pemerintah dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hal yang perlu dipahami dan dipatuhi dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan akuntansi yaitu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.¹⁴

- a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal aturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti bahwa pendapatan diakui Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- b. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran yang telah menambah atau mengurangi kas.

¹³ Abdul Halim, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah", (Jakarta: Jagakarsa, 2007), h.49

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Prinsip layak temu daya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana yang dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

c. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Prinsip periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pertama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

e. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembaran muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

g. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan.

3. Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka untuk tercapainya efektivitas standar akuntansi pemerintah diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai. Sistem pengendalian internal yang memadai dapat mencegah terjadinya berbagai kecurangan di pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah sangat rentan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

Dari segi pengertiannya, sistem pengendalian intern (*intern control system*) dapat dibagi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit dapat diartikan sebagai internal *check* yang merupakan sistem yang secara

otomatis dapat saling memeriksa pencatatan data akuntansi yang dilakukan oleh suatu bagian yang dengan dilakukan oleh bagian lain dalam pekerjaan yang sama. Sedangkan dalam arti luas pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan melainkan meliputi semua alat-alat yang digunakan pimpinan untuk mengadakan pengawasan.¹⁵

Menurut AICPA pengertian dari pengawasan intern adalah pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.¹⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian internal pemerintah disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan pedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturran perundang-undangan.¹⁷

Unsur sistem pengendalian internal merupakan dasar untuk penyelenggaraan dan sebagai tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Unsur pengendalian internal meliputi:¹⁸

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

¹⁵ Zuhendri, "Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian di PT Chevron Pacific Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.4 No.2 99-201, 2015, h. 178

¹⁶ American Institute Of Certified Public Accountants, "*Intrnal Control Elements Of Coordinated System and Its Importance to Management and The Independent Public Accountants*", (1949) Lihat Pada Zuhendri, "Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian di PT Chevron Pacific Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.4 No.2 99-201, 2015, h. 179

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.

¹⁸ Agoes, Sukrisno, "*Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1 Edisi 3*",(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) Lihat Pada Amalia Ika Paristu, "Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa)", *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bianis*, Vol.1 No.2, 150-168, 2014, h.153

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atau resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko mencakup:

1) Identifikasi risiko

Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

2) Analisis risiko

Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

d. Informasi Dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Instansi pemerintah harus memiliki instansi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya diseluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

Pimpinan instansi pemerintah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi yang penting kepada pegawai dan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1) Pimpinan instansi pemerintah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan.

2) Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai diseluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian internal.

e. Pemantauan.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan

menggunakan daftar uji pengendalian internal. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian internal dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut.

Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif yaitu:¹⁹

- 1) Tujuan yang jelas
Jika pengendalian tidak dapat dimengerti maka prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan, maka pengendalian tersebut tidak mempunyai nilai.
- 2) Dibangun untuk tanggung jawab bersama
Pengendalian harus dimanfaatkan oleh seluruh pengguna.
- 3) Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan
Biaya yang dikeluarkan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu jangan sampai biaya tersebut melampaui manfaat.
- 4) Didokumentasikan
Proses dokumentasi harus sederhana dan dapat dimengerti, jelas hubungan risiko pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian manajemen berada pada tempatnya.
- 5) Dapat diuji dan direview
Proses pengendalian manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan direview agar dapat disempurnakan.
- 6) Dapat dikelola
Pengendalian internal yang akan ditetapkan dapat ditambah, dikurangi, diubah maupun diperbarui.

A. Metodologi Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan semua kuesioner telah terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut variabel masing-masing dan dilanjutkan memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianggap valid dan konsisten, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 23.0. seluruh data yang telah dirangkum lalu ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melakukan hipotesis menggunakan rumus statistika. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Kualitas Data

Suatu penelitian yang tidak valid atau konsisten akan berdampak pada kesimpulan penelitian yang menjadi bias dan tidak tepat sasaran. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sehingga

¹⁹ Akmal, "Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)", (Petukangan Utara: PT. Indeks, 2006), h. 25

diperlukan pengujian kualitas data untuk mengetahui keabsahan suatu hasil penelitian. Suatu penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti.

a. Uji Validitas Data

Uji validitas data bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan untuk mengenai sasaran. Uji validitas dengan menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor pada setiap pertanyaan dengan jumlah total skornya. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi *product momen* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r : Koefisien korelasi *product momen*

x : Jumlah skor untuk indikator X

y : Jumlah skor untuk indikator Y

n : Banyaknya responden (sampel) dari variabel x, y dari kuesioner

Seperti yang telah dikemukakan bahwa, analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor dari sejumlah pertanyaan dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan konstruksi yang kuat.²⁰

b. Uji Reabilitas Data

Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Alpha cronbach's*. koefisien ini merupakan reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala *likert* sehingga koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*. Jika koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0.60 (a>0,60) maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, apabila sebaliknya alpha lebih rendah dari 0,60 (a<0,60) maka instrumen tersebut tidak reliabel.²¹ Untuk menguji realibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach's* dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[\frac{1-S_i^2}{S_x^2} \right]$$

Keterangan :

A : Koefisien Reabilitas

k : Jumlah instrumen pertanyaan/ pernyataan

$\sum x^2$: Jumlah varians dari setiap instrumen

S_x^2 : Varian dari keseluruhan instrument

²⁰ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.178

²¹ Sofian Siregar, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS*” (Jakarta: Kencana, 2013), h. 57

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Karakteristik Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden yang bekerja pada SOPD Kabupaten Bengkalis. Penyebaran Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pegawai yang bekerja pada SOPD Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode *propotional sampling* yang dimana sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pada setiap SOPD Kabupaten Bengkalis.

Dari 120 kuesioner yang disebarakan kepada 120 responden, didapat sebanyak 93 kuesioner yang memenuhi karakteristik data penelitian. Distribusi ke 93 kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	120
Kuesioner yang kembali	93
Kuesioner yang dapat digunakan	93
Kuesioner yang tidak kembali	27
Tingkat pengembalian kuesioner ($93/120 \times 100\%$)	77,5%
Tingkat pengembalian yang digunakan ($93/120 \times 100\%$)	77,5%

Sumber : Kuesioner Penelitian

Dari table 1 di atas dapat dilihat bahwa kuesioner yang tidak kembali sebanyak 27 kuesioner yang disebabkan kehilangan dan rusak.

B. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik yang diteliti meliputi jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan responden. Ringkasan mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	39	41,9
Perempuan	54	58,1
Jumlah	93	100

Sumber : Kuesioner Penelitian 2018

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
20 – 25	8	8,6
26 – 30	17	18,3
31 – 35	21	22,6

36 – 40	27	29,0
< 40	20	21,5
Jumlah	93	100

Sumber : Kuesioner Penelitian 2018

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	S2	8	8,6
2	S1	41	44,1
3	Diploma 4	-	-
4	Diploma 3	23	24,7
5	SLTA Sederajat	21	22,6
	Jumlah	93	100

Sumber : Kuesioner Penelitian 2018

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
0 – 5	9	9,7
6 – 10	17	18,3
11 – 15	22	23,7
16 – 20	26	27,9
≥ 21	19	20,4
Jumlah	74	100

Sumber : Kuesioner Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 2, 3, 4 dan 5 dapat dilihat bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 54 orang responden atau 58,1%, dan laki-laki 39 orang atau 41,9%. Sedangkan berdasarkan usia dalam penelitian ini lebih didominasi oleh pegawai yang berusia 36-40 tahun sebanyak 27 orang atau 29,0%, kemudian pegawai yang berusia 31-35 tahun sebanyak 21 orang atau 22,6%, usia >40 tahun berjumlah 20 orang atau 21,5%, usia 26-30 tahun sebanyak 17 orang atau 18,3%, dan usia 20-25 tahun sebanyak 8 orang atau 8,6%.

C. Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf dan Kualitas Laporan Keuangan disajikan dalam tabel *descriptive statistic* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	15.3441	1.94207	93
X1	26.1398	2.47418	93
X2	15.4731	2.01403	93
X3	16.0323	1.87924	93

Sumber : Pengolahan Data SPSS

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,1398 dengan standar deviasi sebesar 2,47418. Nilai rata-rata 26,1398 menunjukkan besarnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 26,1398. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasiasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasisinya.

2. Sistem Pengendalian Internal (X_2)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,4731 dengan standar deviasi sebesar 2,01403. Nilai rata-rata 15,4731 menunjukkan besarnya Sistem Pengendalian Internal sebesar 15,4731. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasiasi Sistem Pengendalian Internal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasisinya.

3. Kompetensi Staf (X_3)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,0323 dengan standar deviasi sebesar 1,87924. Nilai rata-rata 16,0323 menunjukkan besarnya Kompetensi Staf sebesar 16,0323. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasiasi Kompetensi Staf ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasisinya.

4. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,3441 dengan standar deviasi sebesar 1,94207. Nilai rata-rata 15,3441 menunjukkan besarnya Kualitas Laporan Keuangan sebesar 15,3441. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasiasi Kualitas Laporan Keuangan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasisinya.

D. Hasil Uji Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, terlebih dahulu akan diperiksa kelengkapannya agar selanjutnya dapat dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap validitas dan reabilitas data. Pengujian data ini dilakukan secara keseluruhan pada semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. *for windows*

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Seluruh pertanyaan didalam penelitian ini berjumlah 23 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini df = 93-2=91, sehingga dapat r tabel untuk df (91) = 0,2039 Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Validitas X1
Correlations

	SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7	SAP8	X1
SAP 1	1	.252*	.463**	.299**	.351**	.262*	.131	.299**	.586**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)		.015	.000	.004	.001	.011	.212	.004	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 2	.252*	1	.345**	.270**	.418**	.276**	.363**	.458**	.646**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.015		.001	.009	.000	.007	.000	.000	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 3	.463**	.345**	1	.292**	.450**	.335**	.437**	.462**	.738**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.000	.001		.005	.000	.001	.000	.000	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 4	.299**	.270**	.292**	1	.294**	.328**	-.025	.227*	.546**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.004	.009	.005		.004	.001	.809	.028	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 5	.351**	.418**	.450**	.294**	1	.487**	.407**	.485**	.746**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.004		.000	.000	.000	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 6	.262*	.276**	.335**	.328**	.487**	1	.222*	.362**	.605**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.011	.007	.001	.001	.000		.032	.000	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 7	.131	.363**	.437**	-.025	.407**	.222*	1	.473**	.572**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.212	.000	.000	.809	.000	.032		.000	.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
SAP 8	.299**	.458**	.462**	.227*	.485**	.362**	.473**	1	.734**
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.028	.000	.000	.000		.000
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93
X1	.586**	.646**	.738**	.546**	.746**	.605**	.572**	.734**	1
Pearson Correlation									
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	93	93	93	93	93	93	93	93	93

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 8

Uji Validitas Data X2
Correlations

		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	X2
SPI1	Pearson Correlation	1	.389**	.494**	.107	.409**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.306	.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
SPI3	Pearson Correlation	.389**	1	.528**	.449**	.314**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.000
	N	93	93	93	93	93	93
SPI2	Pearson Correlation	.494**	.528**	1	.380**	.303**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.003	.000
	N	93	93	93	93	93	93
SPI4	Pearson Correlation	.107	.449**	.380**	1	.178	.595**
	Sig. (2-tailed)	.306	.000	.000		.088	.000
	N	93	93	93	93	93	93
SPI5	Pearson Correlation	.409**	.314**	.303**	.178	1	.640**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.003	.088		.000
	N	93	93	93	93	93	93
X2	Pearson Correlation	.709**	.777**	.754**	.595**	.640**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93	93

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 9
Hasil Uji Validitas X3
Correlations

		KS1	KS2	KS3	KS4	KS5
KS1	Pearson Correlation	1	.333	.638	.588	.601
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93
KS2	Pearson Correlation	.333	1	.376	.306	.376
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.003	.000
	N	93	93	93	93	93
KS3	Pearson Correlation	.638	.376	1	.643	.783
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	93	93	93	93	93
KS4	Pearson Correlation	.588	.306	.643	1	.651
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000		.000
	N	93	93	93	93	93
KS5	Pearson Correlation	.601	.376	.783	.651	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 10

**Hasil Uji Validitas Y
Correlations**

		LK1	LK2	LK3	LK4	LK5	Y
LK1	Pearson Correlation	1	.595**	.208*	.063	.164	.544**
	Sig. (2-tailed)		.000	.045	.548	.116	.000
	N	93	93	93	93	93	93
LK2	Pearson Correlation	.595**	1	.511**	.325**	.302**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.003	.000
	N	93	93	93	93	93	93
LK3	Pearson Correlation	.208*	.511**	1	.233*	.172	.582**
	Sig. (2-tailed)	.045	.000		.025	.100	.000
	N	93	93	93	93	93	93
LK4	Pearson Correlation	.063	.325**	.233*	1	.745**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.548	.001	.025		.000	.000
	N	93	93	93	93	93	93
LK5	Pearson Correlation	.164	.302**	.172	.745**	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	.116	.003	.100	.000		.000
	N	93	93	93	93	93	93
Y	Pearson Correlation	.544**	.767**	.582**	.752**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	93	93	93	93	93	93

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini dapat kita lihat dari nilai r hitung seluruh indikator lebih besar dari r tabel n 74, $\alpha 5\% = 0,2039$.

b. Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reabilitas data penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 11

**Hasil Uji Reabilitas Data X1
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.797	8

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 12

**Hasil Uji Reabilitas Data X2
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	5

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 13

Hasil Uji Reabilitas Data X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.838	5

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 14
Hasil Uji Reabilitas Data Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.715	5

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji reabilitas di atas dapat dijustifikasikan bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *cronbach alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kolmogorov-smirnov Test*. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari α 5%.²² Berikut tabel hasil uji normalitas data:

Tabel 15
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	15.3440860
	Std. Deviation	.71982679
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.067
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Pengolahan Data SPSS

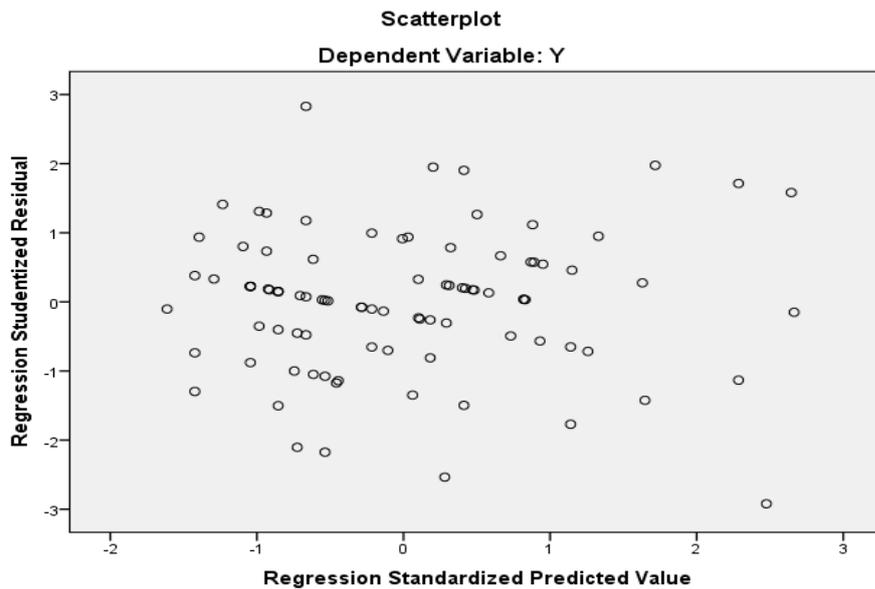
Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp Sig Kolomogorov-Siminov (K-S)* lebih besar dari α 5%. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

²² Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

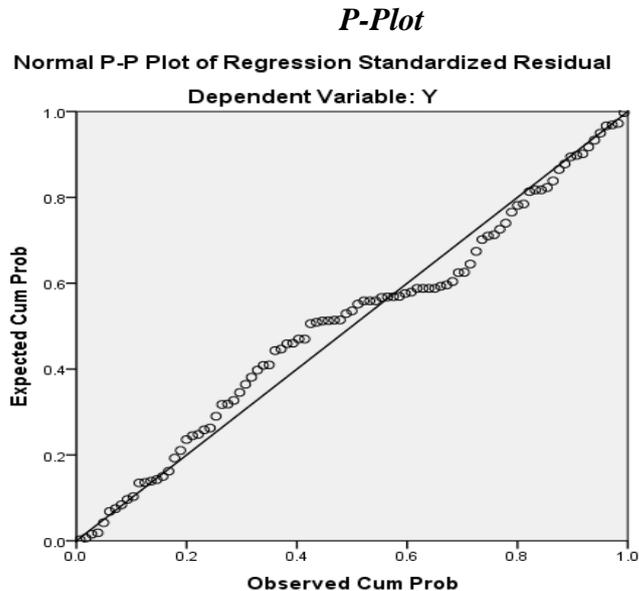
b. Hasil Uji Heterokedastisitas Data

Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas atau tidak dilakukan dengan melihat grafik plot (*scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka akan disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas. Namun, jika ada pola yang jelas, seras titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.²³

Gambar 1



Gambar 2



²³ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h.139

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dapat dilihat dari gambar 1 di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

c. Hasil Uji Multikolinieritas Data

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai *tolerance* diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10, hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinieritas Data
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	21.213	6.408		3.310	.001		
x1	.499	.166	.332	3.013	.004	.460	2.174
x2	.638	.160	.425	3.982	.000	.984	1.017
x3	.320	.134	.263	2.384	.020	.465	2.151

a. Dependent Variable: y

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai *tolerance* yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi linier berganda berguna untuk mendapatkan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Keterangan :

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- X₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- X₂ : Sistem Pengendalian Internal
- X₃ : Kompetensi Staf Akuntansi
- a : Konstanta
- b₁, b₂, b₃ : Koefisien Regresi

Berikut ini adalah hasil uji regresi yang didapat:

Tabel 17
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

(Constant)	21.213	6.408		3.310	.001
x1	.499	.166	.332	3.013	.004
x2	.638	.160	.425	3.982	.000
x3	.320	.134	.263	2.384	.020

a. Dependent Variable: y

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 17 di atas maka dapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 21,213 + 0,499X_1 + 0,638X_2 + 0,320X_3$$

Penjelasan dari angka diatas adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 21,213. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas tidak berpengaruh, maka besarnya kualitas laporan keuangan adalah 21,213.
- Nilai koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,499. Artinya adalah bahwa setiap penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,499 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,638. Artinya adalah bahwa setiap sistem pengendalian internal sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,638 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel kompetensi staf akuntansi sebesar 0,320. Artinya adalah bahwa setiap kompetensi staf akuntansi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,320 dengan asumsi variabel lain tetap.

5. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Signifikan Simultan)

Untuk menguji apakah variabel Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dilakukan pengujian hipotesis simultan sebagai berikut: dengan taraf signifikan (α) : 0,025, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_4 diterima. Nilai F_{hitung} dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 18
Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47.670	3	15.890	4.725	.004 ^b
	Residual	299.319	89	3.363		
	Total	346.989	92			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 18 di atas, dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 4,725. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Dengan $\alpha=0.025$ $v=3$ dan $df=89$ diketahui nilai F_{tabel} sebesar 3,266601. Dari nilai tersebut, diketahui nilai F_{hitung} (4,937) $>$ F_{tabel} (3,308) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat

pengaruh simultan yang signifikan variabel Penerapan Standar Akuntansi (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), dan Kompetensi Staf Keuangan (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

6. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 19
Hasil Uji Determinasi X_1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.190	.122	1.94209

a. Predictors: (Constant), x1

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 19 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 19%.

Tabel 20
Hasil Uji Determinasi X_2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.237 ^a	.176	.043	2.02731

a. Predictors: (Constant), x2

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 20 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 17,6%.

Tabel 21
Hasil Uji Determinasi X_3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.307 ^a	.125	.082	1.98590

a. Predictors: (Constant), x3

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 21 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 12,5%.

Tabel 22
Hasil Uji Determinasi Simultan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.366 ^a	.190	.122	1.94209						

1	.491 ^a	.421	.220	4.65750	.421	4.725	3	89	.004	1.786
---	-------------------	------	------	---------	------	-------	---	----	------	-------

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan tabel 22 di atas, diketahui nilai R Square sebesar 0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 42,1% sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

E. Hasil Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* (α). nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.²⁴ Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 93 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 89 : 0,025 \\
 &= 1,986979
 \end{aligned}$$

Keterangan :

n : jumlah
k : jumlah variabel bebas
1 : konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Hasil hipotesis H_1

Untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara paralel antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} < \alpha = 0,05$, maka H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{sig.t} > \alpha = 0,05$, maka H_1 ditolak.

Dari tabel 18 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,013 > 1,994$ dan $\text{sig.t} 0,004 < 0,05$ dengan demikian H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut dengan SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

²⁴ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h.40

laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya.²⁵

Dalam penelitian ini apabila pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas yang memenuhi karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, serta juga akan mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

2. Hasil hipotesis H₂

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara paralel antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H₂ diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H₂ ditolak.

Dari tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,982 > 1,994$ dan $sig.t 0,000 < 0,05$ dengan demikian H₂ diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan di setiap SOPD. Karena bertujuan untuk memastikan terwujudnya rencana kerja pemerintah dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan negara.

3. Hasil hipotesis H₃

Untuk melihat pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara paralel antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H₃ diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, maka H₃ ditolak.

Dari tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,384 > 1,994$ dan $sig.t 0,020 < 0,05$ dengan demikian H₃ diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka disimpulkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Didalam penyusunan laporan keuangan, hal yang sangat penting adalah kompetensi staf dibidang akuntansi. Hal ini dikarenakan apabila staf mempunyai kompetensi akuntansi yang baik, maka diharapkan dapat membuat dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

1. Hasil pengujian hipotesis pertama $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,012 > 1,994$ dan $sig.t 0,004 < 0,05$ membuktikan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi

²⁵ Indra Bastian, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", (Jakarta: Erlangga, 2010), h.138

Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar 19%. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Nurlaila (2014), Riani Nurhayati (2013), I Dagong (2013) yang mengemukakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,982 > 1,994$ dan $sig.t$ $0,000 < 0,05$ membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar 17,6%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Dwi Seftihani Riana (2014), dan Tantriana Sukmaningrum dan Puji Harto (2012) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Secara Simultan Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,384 > 1,994$ dan $sig.t$ $0,020 < 0,05$ membuktikan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar 12,5%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Ni Luh Nyoiman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) Desiana (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $4,937 > 3,308$ dan $sig.t$ $0,004 < 0,05$ membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar 42,1%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Ni Luh Nyoiman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) T. Asri (2015) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, “*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*”, (Jakarta: Jagakarsa, 2007)
- Adi, Wijaya, “*Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*” (Jakarta: P2E-LIPI, 2003)
- Akmal, “*Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*”, (Petukangan Utara: PT. Indeks, 2006)
- Al haryono jusup, “*Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2*”, (Yogyakarta: Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN, 2001)
- Baridwan, Zaki, “*Pengantar Akuntansi Edisi 21*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Bandung: Diponegoro, 2005)

- Dharma “*Manajemen Supervisi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Diana dan Setiawati, “*Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur, dan Penerapan (Edisi 1)*”, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011)
- Farid dan Siswanto, “*Analisis Laporan Keuangan*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Harahap, Sofyan Syafri, “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011)
- Indra Bastian, “*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Moehariono, “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Mulyadi, “*Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Munawir, “*Analisa Laporan Keuangan (Edisi Keempat)*”, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Nordiawan, Ayuningtyas, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Rosidah, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. www.bpk.go.id, Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Pukul 20:15
- www.kepegawaian.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 23:18 Wib
- www.span.depkeu.go.id, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018, Pukul 21:29 Wib.